

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara berkembang identik dengan isu kemiskinan, termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan masalah serius karena akan mendorong bentuk masalah sosial-ekonomi lainnya. Kemiskinan sangat merugikan baik dari sudut pandang individu maupun negara. Individu dengan status miskin harus menghadapi kehidupan yang relatif negatif seperti status sosial rendah, rumah tidak layak, kelaparan, dan keterbatasan akses fasilitas publik. Individu dengan status miskin juga rawan memiliki kesehatan mental (McLoyd, 1995). Dari sudut pandang yang lebih luas, kemiskinan mengganggu produksi nasional. Tingginya angka kemiskinan merepresentasikan sumber daya tidak unggul sehingga kegiatan perekonomian tidak produktif. Lebih parah, rumah tangga dengan status miskin akan membesarkan anak dalam kondisi kemiskinan sehingga pertumbuhan anak tidak maksimal. Anak yang terlahir miskin tidak mendapatkan gizi dan akses pendidikan yang cukup. (Destiarsono & Darwanto, 2022)

Melihat fenomena kemiskinan yang terjadi di pedesaan, sangat penting untuk melakukan studi perilaku agar upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan dapat dilakukan secara tepat dan terpusat. Loayza dan Raddatz (2010) menyatakan bahwa sektor pertanian sangat berhubungan dengan pengurangan kemiskinan di daerah pedesaan. Pendapat ini didukung oleh penelitian terbaru dari Salqaura (2020). Di sisi lain, Sihombing dan Bangun (2019) berpendapat bahwa ada hubungan yang kuat antara daerah pedesaan dan kemiskinan, tetapi arahnya negatif. Pendapat mereka diperkuat oleh penelitian Cervantes-Godoy dan Dewbre (2010) serta diperkuat lebih lanjut oleh Rehman et al. (2016), yang menyimpulkan bahwa pengurangan kemiskinan dapat dicapai dengan meningkatkan produktivitas pertanian. (Saifuloh & Nursini, 2022)

Indonesia merupakan bukti empiris negara berkembang yang belum menyelesaikan isu kemiskinan. meskipun kemiskinan desa dan kota mengalami penurunan tajam dalam dua dekade terakhir, indikator ini tidak cukup untuk memberikan kesimpulan bahwa kemiskinan di Indonesia akan hilang. Tingkat kemiskinan *absolute* Indonesia merupakan yang tertinggi di Asia Pasifik, dan tertinggi kedua berdasarkan persentase (%).

Kemiskinan masih menjadi tantangan besar yang harus diatasi di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), pada September 2021, terdapat 26,42 juta orang miskin di Indonesia, atau sekitar 9,71% dari total populasi. Masalah kemiskinan ini memiliki dampak yang signifikan, terutama pada masyarakat pedesaan yang sebagian besar mengandalkan sektor pertanian sebagai sumber utama penghidupan.

Table 1 Distribusi Populasi berdasarkan Kelas Ekonomi (%) Tahun 2018

	Miskin ekstrem	Miskin moderat	Kelompok rentan	Kelompok aman	Kelompok menengah
Kamboja	0,7	14	49,6	34,9	0,7
Indonesia	7,5	24,6	35,9	27,7	4,3
Laos	13,8	27,9	36,0	20,1	2,2
Filipina	6,6	18,7	30,8	34,7	9,2
Vietnam	2,7	7,1	23,7	57,0	9,5
Malaysia	0,0	0,3	2,6	31,3	65,7
Thailand	0,0	0,8	10,1	53,6	35,4

Sumber: World Bank (2018)

Berdasarkan statistik World Bank (2018), 7,5% penduduk Indonesia tergolong miskin ekstrem, 24,6% tergolong miskin moderat, 35,9% tergolong rentan, 27,7% tergolong secure, dan hanya 4,3% yang termasuk golongan menengah. Angka ini hanya sedikit lebih baik dari Laos sangat jauh dari Malaysia, Thailand, Vietnam, bahkan Filipina. Secara agregat, 82,95 juta jiwa populasi Indonesia masih tergolong miskin, yaitu penjumlahan miskin ekstrem dan moderat. Jumlah ini merupakan angka yang sangat tinggi dan tidak dapat ditoleransi jika Indonesia ingin mengejar

ketertinggalan di Asia tenggara, bahkan dunia. Di sisi lain, 102,46 juta jiwa penduduk termasuk kelompok rentan yang siap jatuh miskin jika terjadi *shock* di sektor ekonomi, misalnya bencana alam, pandemi, gagal panen masal, atau keadaan politik yang tidak stabil.

Kemiskinan yang parah secara global tetap menjadi fenomena pedesaan meskipun ada pertumbuhan urbanisasi dari 1,2 miliar penduduk sangat miskin di dunia dengan 75% tinggal di daerah pedesaan dan mayoritas mengandalkan sektor pertanian, kehutanan, perikanan, serta kegiatan terkait untuk bertahan hidup. Peningkatan perekonomian pedesaan secara berkelanjutan berpotensi meningkatkan kesempatan kerja di pedesaan, mengurangi kesenjangan pendapatan antar daerah, membendung migrasi dari desa hingga kota dan pada akhirnya mengurangi kemiskinan pada sumbernya. Selain itu pembangunan daerah pedesaan dapat berkontribusi terhadap pelestarian lanskap pedesaan, perlindungan budaya dan tradisi asli sementara masyarakat pedesaan dapat berfungsi sebagai penyangga sosial bagi masyarakat miskin di perkotaan pada saat krisis ekonomi atau kerusuhan sosial perkotaan.

Namun baru-baru ini muncul komitmen nasional dan internasional mengenai kemiskinan dan target-target terkait (seperti dalam tujuan pembangunan milenium dan strategi pengurangan kemiskinan di tingkat negara) ditambah dengan kegagalan paradigma masa lalu dalam melakukan pengurangan kemiskinan di pedesaan secara massal telah memberikan dampak buruk pada kemiskinan di pedesaan. Dorongan baru terhadap peran pertanian dalam pembangunan dan pengentasan kemiskinan pada saat yang bersamaan model pembangunan pedesaan baru telah muncul yang menekankan pendekatan yang lebih luas dimana ruang pedesaan dan perkotaan dipandang sebagai sebuah kontinum dan interaksi keduanya ditekankan. (Anríquez & Stamoulis, 2007)

Kebijakan publik di tingkat nasional dan mobilisasi sumber daya baik di tingkat nasional maupun internasional tidak selalu memperhitungkan berbagai potensi perekonomian pedesaan. Kebijakan publik dan investasi di negara-negara berkembang secara historis lebih mengutamakan sektor industri perkotaan dan jasa dibandingkan pembangunan sektor pertanian dan pedesaan lainnya. Dalam banyak kasus kebijakan pembangunan pedesaan yang koheren (yang bersifat lintas sektoral) telah menjadi korban dari kurangnya kerangka kelembagaan lintas sektoral. (Subanti et al., 2017)

Banyak ahli kini sepakat bahwa tujuan-tujuan terkait pembangunan berkelanjutan mencakup SDG1 (kemiskinan), SDG2 (kelaparan), SDG3 (kesehatan dan kesejahteraan), SDG10 (pengurangan ketimpangan), dan SDG12 (konsumsi dan produksi) dapat diatasi dengan baik melalui pengembangan sektor pertanian. Berbagai organisasi pembangunan dan pemerintah menganggap teknologi pertanian sebagai cara yang layak untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan sektor pertanian.

Menurut Todaro (2006), tujuan peningkatan ekonomi tidak hanya terbatas pada kemajuan ekonomi, namun juga mencakup penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan pendapatan, serta penciptaan lapangan kerja dalam konteks ekonomi yang sedang tumbuh. Dengan demikian, kemiskinan dapat dianggap sebagai masalah krusial yang harus diatasi. Pemenuhan sistem ekonomi tidak lagi paling mudah diukur dengan peningkatan PDB saja, tetapi juga kapasitas suatu tempat untuk menaklukkan masalah kemiskinan. (Ginantie, 2016)

Faktor penting lainnya dalam pengentasan kemiskinan di negara berkembang adalah sektor pertanian. Struktur perekonomian Indonesia masih mengandalkan sektor pertanian dengan nilai kontribusi sebesar 14,27%. 35,92 juta penduduk Indonesia terhubung secara langsung di sektor pertanian (termasuk kehutanan dan perikanan). Kondisi ini menunjukkan bahwa peningkatan

kapasitas pertanian sangat penting. Cervantes-godoy & Dewbre (2010) menemukan bahwa pertumbuhan pendapatan pertanian mengurangi kemiskinan di negara – negara berkembang. Arham & Gorontalo (2020) menemukan hasil yang lebih spesifik bahwa pertumbuhan sektor pertanian hanya mengurangi kemiskinan di desa. (Destiariono & Darwanto, 2022)

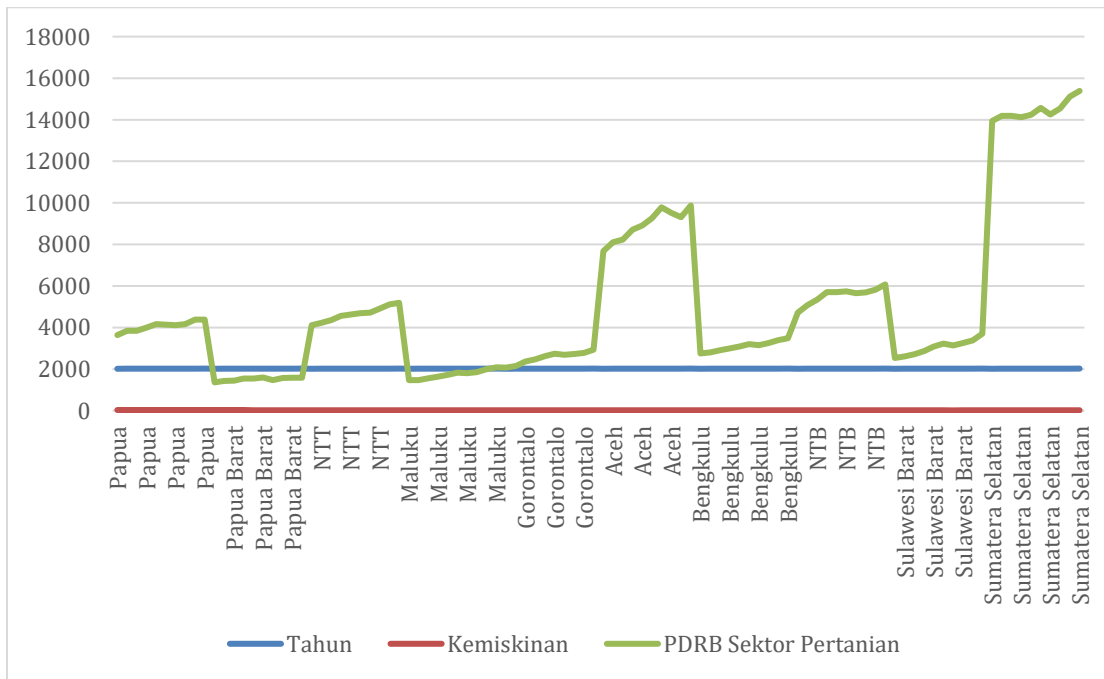
Sektor pertanian berperan dalam menyumbang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia terbukti terus mengalami peningkatan. Berdasarkan data statistik, kontribusi wilayah pertanian terhadap PDB Indonesia mencapai 12,40% pada tahun 2022, menurun 0,88% dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2019, kontribusi wilayah pertanian luas terhadap PDB Indonesia mencapai 13,02% dengan kontribusi pertanian sempit sebesar 9,67%. Selama tahun 2019-2021, kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDB Indonesia melaju dari 3,27% pada tahun 2019 menjadi 3,63% pada tahun 2021. (Darmawan, 2022)

Pada tahun 2020, sektor pertanian tetap mampu mempertahankan peningkatan kualitas yang tinggi dengan kontribusi terhadap PDB sektor pertanian besar tumbuh sebesar 1,77% dan tahun 2021 sebesar 1,84%. Selain itu, PDB pertanian sempit meningkat sebesar 2,13% dan pada tahun 2021 sebesar 1,08%.

Sektor pertanian Indonesia terdiri dari beberapa subsektor yang berkontribusi secara signifikan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Misalnya, tanaman perkebunan menyumbang 3,76% terhadap PDB, diikuti oleh perikanan dengan kontribusi 2,58%, tanaman pangan sebesar 2,32%, peternakan sebesar 1,52%, hortikultura 1,44%, kehutanan 0,60%, serta jasa-jasa pertanian dan perburuan sebesar 0,18%. (Santika, 2023)

Sayifullah & Emmalian (2018) menunjukkan bahwa kawasan pedesaan sangat penting dalam proses perbaikan ekonomi karena menghasilkan produk yang dibutuhkan sebagai input faktor lain,

terutama perusahaan tekstil, perusahaan makanan, dan perusahaan minuman. Dengan demikian pembangunan pertanian perlu diperhatikan sebagai salah satu pembangunan ekonomi serta nasional. Peran strategis sektor pertanian meliputi penyediaan makanan dan bahan baku untuk industri, kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), penghasilan devisa, penciptaan lapangan kerja, dan menjadi sumber utama pendapatan bagi rumah tangga. (Kharisma, 2020)



Gambar 1 Hubungan antara Kemiskinan dengan PDRB Sektor Pertanian

Gambar 1 dari grafik dapat diamati bahwa terdapat beberapa puncak atau lonjakan signifikan pada garis Kemiskinan dan PDRB Sektor Pertanian. Garis orange yaitu kemiskinan bergerak pada level atau nilai yang konstan sepanjang periode waktu yang ditampilkan pada sumbu horizontal. Ini mengindikasikan bahwa tingkat kemiskinan dalam konteks ini cenderung stabil atau tidak mengalami perubahan selama rentang waktu yang dianalisis. Sedangkan garis abu-abu yaitu PDRB Sektor Pertanian menunjukkan pola naik turun atau fluktuasi yang cukup besar dari waktu ke waktu. Jadi, berdasarkan gambaran grafik, tingkat kemiskinan relatif konstan, sedangkan PDRB

Sektor Pertanian mengalami perubahan yang cukup signifikan di sepanjang rentang waktu yang dianalisis.

Pertanian merupakan sektor penting dalam sistem ekonomi dan mempekerjakan banyak orang di negara-negara berkembang. Di Asia Tenggara, sektor pertanian juga menyumbang lebih dari 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyediakan lapangan kerja bagi sepertiga populasi. Hal ini sejalan dengan tujuan pembangunan *Millennium Development Goals* (MDGs). pada tahun 2015 yakni pengembangan wilayah pertanian sangat penting untuk mengurangi kemiskinan dan kelaparan, Tiga per empat orang miskin di Asia Tenggara diketahui tinggal di daerah pedesaan dan sangat bergantung pada sektor pertanian. Pada tahun 2009, berdasarkan bukti empiris melalui area di 25 negara, pertumbuhan keuntungan per kapita di dalam sektor pertanian dapat mengurangi kemiskinan sebesar 52%. (Hermawan, 2012)

Data menunjukkan bahwa di sejumlah negara berkembang, lebih dari 75% penduduk bekerja di sektor pertanian, dan sektor ini menyumbang lebih dari 50% pendapatan nasional berasal dari wilayah pedesaan, dan sebagian besar ekspor negara tersebut didominasi oleh hasil pertanian.

Dalam laporan Angka Tetap Pertanian (ATAP) yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan disahkan oleh Kementerian Pertanian, beberapa komoditas pangan yang memainkan peran penting dalam meningkatkan neraca perdagangan Indonesia adalah beras, bawang merah, dan jagung. Selain itu, beberapa komoditas pertanian lain yang mengalami pertumbuhan signifikan termasuk nanas, salak, daging ayam, telur unggas, kelapa, kelapa sawit, kopi, kakao, karet, pala, dan teh. (Finaka, 2018)

Meskipun kawasan pedesaan memiliki dampak yang efektif bagi masyarakat, tetapi sektor pertanian masih belum mampu mengatasi masalah kemiskinan di pedesaan masih menjadi isu

pertama. Meskipun jumlah penduduk miskin di pedesaan telah menurun, tetapi jumlah penduduk miskin di pedesaan masih cukup tinggi. Kesejahteraan petani sekarang ini tidak bertambah dikarenakan harga yang diterima oleh petani dan harga yang dibayarkan oleh konsumen tetap rendah, terkait dengan rendahnya daya tawar petani. Tujuan dari Pembangunan pertanian pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, setiap upaya peningkatan sektor pertanian biasanya menargetkan kesejahteraan petani sebagai tujuan utama, yang diwujudkan melalui berbagai regulasi dan program pembangunan pertanian. Pemerintah telah berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan industri pertanian, menjaga kestabilan pangan, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.

Berikut adalah gambaran rata-rata persebaran penduduk miskin pada 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Indonesia, didasarkan pada persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan (*Head Count Index/HCI*) yang melebihi tingkat nasional dan distribusi Jumlah Penduduk Miskin (*Head Count/HC*) yang paling banyak. Hal ini didasarkan pada tingginya nilai tambah pada sektor pertanian dari tahun 2019 hingga 2023, sebagai berikut.

Table 2 Rata-Rata Persebaran Penduduk Miskin pada 10 Provinsi di Indonesia dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Tahun 2014-2023 (Persen)

Provinsi	Penduduk Miskin (%)
Papua	27,57
Papua Barat	23,37
NTT	22,08
Maluku	17,98
Gorontalo	16,49
Aceh	15,95
Bengkulu	15,87
NTB	15,19
Sulawesi Barat	11,54
Sumatera Selatan	12,96

Sumber : olah data excel

Berdasarkan Tabel 2 Provinsi Papua memiliki tingkat kemiskinan paling tinggi dengan persentase penduduk miskin mencapai 27,57% dari tahun 2014 hingga 2023. 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan yang paling tinggi di Indonesia, kecuali Papua dan Papua Barat, provinsi lain yang memiliki tingkat kemiskinan diatas 20% adalah NTT (22,08%). Provinsi dengan tingkat kemiskinan terendah dalam 10 besar adalah Sulawesi Barat (11,54%) dan Sumatera Selatan (12,96%). Secara keseluruhan persentase penduduk miskin pada 10 provinsi berkisar antara 11-27% catatan ini menunjukkan bahwa masih tingginya angka kemiskinan di wilayah Indonesia. Informasi ini menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan antara bagian barat dan bagian timur Indonesia ditinjau dalam hal kemiskinan. Terutama berdasarkan perkembangan yang terjadi di masa lampau, kemungkinan besar tingkat kemiskinan di 10 provinsi ini akan tetap stagnan selama periode 2014-2023.

Suatu negara dengan tingkat kemiskinan yang cukup tinggi menunjukkan bahwasannya negara tersebut tidak mampu menciptakan penyerapan tenaga kerja yang lebih cepat daripada jumlah individu yang mencari pekerjaan. Hal ini dapat menjadi faktor utama kemiskinan dan penghambat pembangunan. (Ghinastri & Syafitri, 2024)

Kenaikan tingkat pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan pembukaan lapangan kerja. Kesenjangan antara permintaan tenaga kerja dan lapangan kerja dapat mengakibatkan pergeseran tenaga kerja, baik secara geografis antara pedesaan dan perkotaan, maupun dalam sektor-sektor tertentu.

Table 3 Rata-rata Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Pada 10 Provinsi di Indonesia Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Tahun Tahun 2014-2023 (persen)

Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka
Papua	3,40
Papua Barat	6,33
NTT	3,43

Maluku	7,81
Gorontalo	3,63
Aceh	7,07
Bengkulu	3,68
NTB	3,85
Sulawesi Barat	2,90
Sumatera Selatan	4,78

Sumber : olah data excel

Berdasarkan Tabel 3 secara umum TPT di 10 provinsi tercatat cukup rendah yaitu berkisar antara 2,90%-7,81%. TPT tertinggi berada di Provinsi Maluku sebesar 7,81% diikuti Aceh 7,07% dan Papua Barat 6,336%. Sementara TPT terendah ada di Provinsi Sulawesi Barat dibawah 3% (2,90%). Beberapa provinsi dengan tingkat kemiskinan yang tinggi justru memiliki TPT di bawah rata-rata nasional, seperti Papua, NTT, dan NTB. Hal ini mengindikasikan masalah pengangguran bukan faktor utama tingginya kemiskinan di provinsi-provinsi tersebut. Rendahnya TPT di provinsi miskin diduga lebih disebabkan oleh banyaknya pekerja informal atau tidak produktif, bukan karena lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu selain meningkatkan lapangan kerja juga perlu peningkatan kualitas dan efisiensi tenaga kerja di berbagai provinsi miskin agar dapat mengurangi kemiskinan.

Untuk meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 96/2015 yang merevisi Peraturan Presiden Nomor 15/2010 mengenai Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. Berdasarkan peraturan tersebut, penanggulangan kemiskinan dipercepat dengan merumuskan peraturan dan aplikasi yang mengintegrasikan kegiatan dari berbagai kementerian dan lembaga. Di Kementerian Pertanian, pendekatan ini diwujudkan dengan melaksanakan Program Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA). Program ini melibatkan hampir semua Unit Eselon I di lingkungan Kementan untuk menyusun rencana lokasi kegiatan, merencanakan keluarga yang menjadi

sasaran, menyusun rencana bantuan dan distribusi, serta memberikan bantuan kepada petani yang menjadi sasaran. (Gunawan & Irawan, 2021)

Program BEKERJA telah diimplementasikan sejak tahun 2018. Sistem ini berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat petani miskin di pedesaan, seperti yang dinyatakan oleh Kementerian Pertanian pada tahun 2018 dan 2019. Secara esensial, pemberdayaan masyarakat petani miskin dilakukan melalui program bantuan usaha peternakan unggas, seperti budidaya ayam, pertanian sayuran, buah-buahan, dan tanaman perkebunan. Dengan pendistribusian program bantuan ini, diharapkan petani miskin dapat meningkatkan usaha pertanian mereka dan pendapatan secara berkelanjutan, sehingga mereka dapat mengatasi kemiskinan.

Salah satu upaya pengentasan kemiskinan adalah melalui penguatan pertumbuhan ekonomi sektor pertanian. Sektor pertanian di Indonesia masih tetap menjadi sektor utama dengan kontribusi PDB terbesar ketiga setelah industri pengolahan dan perdagangan. Selain itu sektor pertanian menyerap sekitar 29,81% tenaga kerja Indonesia, maka pertumbuhan sektor pertanian berpotensi menjadi pendorong utama pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Sektor pertanian di Indonesia memiliki peran penting dalam penyerapan tenaga kerja yakni menampung 38,8 juta pekerja atau 29,81% dari total pekerja nasional pada 2020. Selain itu sektor ini juga memberikan kontribusi PDB sekitar 13% pada 2020. Oleh karena itu, sektor pertanian sangat potensial untuk dikembangkan guna pengentasan kemiskinan di Indonesia khususnya di wilayah pedesaan.

Table 4 Perbandingan PDB Indonesia dengan PDB Sektor Pertanian Tahun 2014-2023 (Miliar)

Tahun	PDB Indonesia	PDB Sektor Pertanian	Persentase (%)
2014	2.207.343,6	317.624,3	694,95
2015	2.312.843,5	326.782,7	707,76
2016	2.439.260,6	337.298,7	723,18
2017	2.552.296,9	346.953,5	735,63
2018	2.684.332,2	359.518,5	746,65
2019	2.818.812,7	370.560,6	760,69
2020	2.720.481,3	378.637,1	718,49
2021	2.816.494,7	384.077,4	733,31
2022	2.977.972,9	391.585	760,49
2023	3.124.939	397.291,2	786,56

Sumber : BPS (2023)

Berdasarkan Tabel 4 PDB Indonesia mengalami peningkatan rata-rata 4,8% dari tahun 2014-2023, dan PDB sektor pertanian mengalami meningkat dengan rata-rata 3,7% per tahun namun penurunan 14,4% dari tahun 2014 menjadi 12,7% pada tahun 2023. Kontribusi PDB sektor pertanian terhadap PDB Indonesia mengalami penurunan selama periode tersebut.

Sektor pertanian secara umum meliputi berbagai subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Sehingga, sektor pertanian memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi nasional, tetapi potensi sektor ini menunjukkan hasil yang belum optimal contohnya penduduk miskin, dan pengangguran terbuka. Padahal peluang lapangan pekerjaan sangat besar pada sektor ini dan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meskipun sektor pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi besar terhadap PDB nasional namun laju pertumbuhannya sangat lambat dibandingkan dengan sektor lainnya. Pada triwulan keempat tahun 2018 tercatat bahwa pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berada pada angka 3,91%. Kemudian pada triwulan keempat tahun 2019 sebesar 3,64%, dan pada triwulan keempat tahun 2020 sebesar 1,75%. (Amanda & Lutfi, 2022)

Namun pada kenyataannya, usaha untuk mengurangi kemiskinan melalui sektor pertanian masih dianggap belum mencapai tingkat optimal hingga saat ini. Salah satu faktornya adalah masih adanya kesenjangan yang signifikan dan ketimpangan antar wilayah yang sangat mempengaruhi capaian pengentasan kemiskinan. Sebagai informasi 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi berkontribusi hampir 50% terhadap total penduduk miskin di Indonesia.

Indonesia memiliki kekayaan sumber daya alam yang menghasilkan beragam komoditas yang dicari melalui jaringan di seluruh dunia, terutama barang-barang dari sektor pertanian akibatnya, sektor pertanian memberikan kontribusi yang besar terhadap pendapatan nasional Indonesia, yang tercermin dari data Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Pada tahun 2020, sektor pertanian memberikan kontribusi terus meningkat, seperti yang ditunjukkan oleh nilai zona pedesaan sebesar 222,578 miliar rupiah dengan IPM 0,70%, yang mengindikasikan bahwa peningkatan di dalam populasi yang baik dalam hal kesehatan, sekolah, dan standar hidup yang tinggi. (Mustika & Emilia, 2018)

Kehadiran jaringan yang luas tercermin dalam IPM (Indeks Pembangunan Manusia), yang mencerminkan kemampuan penduduk untuk merasakan perbaikan dalam hal penghasilan, kesehatan, pendidikan, dan faktor-faktor lainnya. Selanjutnya, pertumbuhan moneter berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi yang menghasilkan barang dan jasa melalui jaringan secara proporsional dengan kemakmuran jaringan tersebut (Sukirno, 2011). Dan pengangguran adalah ukuran dari cara-cara yang digunakan oleh banyak tenaga kerja untuk mencari mencari pekerjaan. (Priseptian et al., 2022)

Untuk menilai keberhasilan perbaikan tersebut, dapat diukur melalui tingkat kesejahteraan petani, terutama melalui Nilai Tukar Petani (NTP), adalah perbandingan antara Indeks Harga yang Diterima oleh petani (IT) dan Indeks Harga yang Dibayar oleh Petani (IB). Secara konseptual,

NTP merupakan ukuran sejauh mana produk pertanian yang dihasilkan oleh petani dapat memenuhi keperluan rumah tangga dan persyaratan untuk menghasilkan produk pertanian yang diinginkan. (Hamjaya, 2022)

Menurut Habibullah (2020), Pada tahun 2019, tingkat kemiskinan mengalami penurunan menjadi 9,22%. NTP secara keseluruhan mencapai 104,16, yang menandakan adanya surplus bagi petani. Kenaikan harga produksi terjadi dengan laju yang lebih cepat daripada pertumbuhan biaya konsumsi, sehingga pendapatan petani meningkat lebih cepat daripada biaya yang dikeluarkan. Saragih (2017) juga menyatakan bahwa kemiskinan di pedesaan membaik, walaupun NTP meningkat.

Table 5 Rata-Rata NTP pada 10 Provinsi di Indonesia Dengan Tingkat Kemiskinan Tertinggi Tahun Tahun 2014-2023 (persen)

Provinsi	Nilai Tukar Petani
Papua	102,69
Papua Barat	99,64
NTT	97,95
Maluku	102,34
Gorontalo	102,56
Aceh	106,60
Bengkulu	126,96
NTB	107,83
Sulawesi Barat	110,42
Sumatera Selatan	109,62

Sumber : Olah Data Excel

Dari Table 5 Provinsi Bengkulu memiliki rata-rata NTP tertinggi sebesar 126,96% yang menunjukkan bahwa daya beli petani di Bengkulu paling tinggi dibandingkan 9 Provinsi lainnya. Sementara Provinsi NTT dengan NTP terendah yaitu 97,95% meski demikian angka ini mendekati 100 yang berarti daya beli petani NTT masih relative baik. Provinsi NTB, Sulawesi Barat, dan Aceh memiliki NTP yang relatif cukup tinggi, hal ini mengindikasikan daya beli petani di ketiga Provinsi ini tergolong baik. Secara umum NTP di 10 provinsi berkisar antara 97-126%

menunjukkan daya beli petani yang relatif rendah. Ada kesenjangan daya beli petani antar provinsi contohnya NTP Bengkulu jauh lebih tinggi dibandingkan NTT, rendahnya NTP di beberapa provinsi mengindikasikan produktivitas dan harga jual produk pertanian yang rendah sehingga berpengaruh pada daya beli petani.

Melihat fenomena ini, maka penelitian yang mengkaji upaya pengentasan kemiskinan melalui penguatan sektor pertanian pada 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia menjadi penting untuk dilakukan. Meskipun pertumbuhan sektor pertanian melambat dibanding sektor non-pertanian, PDB sektor pertanian terus meningkat setiap tahunnya. Artinya sektor pertanian berpotensi untuk terus ditingkatkan produktivitasnya. Penelitian ini diharapkan dapat menyajikan saran-saran untuk menyusun kebijakan yang efektif dalam mengatasi masalah kemiskinan di masa mendatang.

B. RUMUSAN MASALAH

Pengentasan kemiskinan di Indonesia masih menjadi tantangan yang signifikan, terutama di 10 provinsi dengan kemiskinan tertinggi. Sektor pertanian sebagai salah satu faktor yang paling penting dalam perekonomian Indonesia, memiliki potensi besar dalam mengentaskan kemiskinan. Maka rumusan masalah penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana pengaruh PDRB Sektor Pertanian terhadap Kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh NTP (Nilai Tukar Petani) terhadap Kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) terhadap Kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia?

4. Bagaimana pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh PDRB Sektor Pertanian terhadap Kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh NTP (Nilai Tukar Petani) terhadap Kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka) terhadap Kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh IPM (Indeks Pembangunan Manusia) terhadap Kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguatan sektor pertanian dalam mengentaskan kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
2. Penelitian ini dapat mengembangkan strategi penguatan sektor pertanian yang efektif dan efisien dalam mengentaskan kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.

3. Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia melalui penguatan sektor pertanian.
4. Penelitian ini dapat meningkatkan kualitas hidup petani di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia melalui penguatan sektor pertanian.
5. Penelitian ini dapat meningkatkan pendapatan petani di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia melalui penguatan sektor pertanian.
6. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran petani tentang pentingnya penguatan sektor pertanian dalam mengentaskan kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
7. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pemerintah tentang pentingnya penguatan sektor pertanian dalam mengentaskan kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.
8. Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penguatan sektor pertanian dalam mengentaskan kemiskinan di 10 provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia.